

**ANALISIS RASIO KETERGANTUNGAN DAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

FADILLA RAHMI ILLAHI

19133098

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS KETRAGANTUNGAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG**

Nama : Fadilla Rahmi Illahi
BP/NIM : 2019/19133098
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

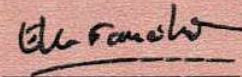
Padang, November 2022

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

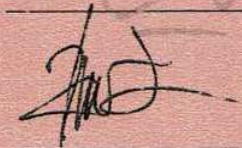
1. Dr. Eka Fauzihardani, S.E., Ak., M.Si (Ketua)



2. Halkadri Fitra, S.E., MM., Ak., CA (Anggota)



3. Dian Fitria Handayani, SE., M.Sc (Anggota)



PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**ANALISIS KETRAGANTUNGAN DAN KMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG**

Nama : Fadilla Rahmi Iliahi
BP/NIM : 2019/19133098
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2022

Diketahui Oleh

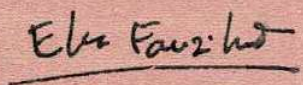
Ketua Prodi


Halkadri Fitra, S.E, MM, Ak, CA

NIP. 198008092010121003

Disetujui Oleh

Pembimbing


Dr. Eka Fauzihardani, S.E, Ak, M.Si

NIP. 197105222000032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadilla Rahmi Illahi
Thn. Masuk/NIM : 2019/19133098
Tempat/Tgl. Lahir : Solok/04 Mei 2001
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perumnas Salasah Indah Blok A.25 Muaro Sijunjung
Judul Tugas Akhir : Analisis Ketergantungan Dan Kemandirian Keuangan
Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Sijunjung

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.



Padang, Oktober 2022

Fadilla Rahmi Illahi

ABSTRAK

**Fadilla Rahmi Illahi : Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian
Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten
Sijunjung**

Pembimbing : Dr.Eka Fauzihardani, S.E,Ak,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat Ketergantungan keuangan daerah pada Kabupaten Sijunjung pada periode 2017- 2021 terdapat permasalahan yaitu 1) Penerimaan pendapatan transfer yang masih tinggi 2) Kurangnya usaha pemerintah dalam mengelola dan menggali secara maksimal sumber Pendapatan daerah 3) Pendapatan asli daerah yang menurun setiap tahunnya

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2021 yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung yang beralamat Jl Prof.M.Yamin SH No 5,Muaro,Kabupaten Sijunjung,Sumatera

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung ditinjau dari : 1) Rasio ketergantungan keuangan daerah dari tahun 2017-2021 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata 86,84% dengan kriteria penilaian sangat tinggi 2) Rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2017-2021 untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata 10,84% dengan kriteria penilaian rendah sekali dan pola hubungan yang terjadi Instruktif.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan, RasioKemandirian

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat, hidayah, serta pertolongan yang diberikan-Nya kepadapenulis sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan judul: **“Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Sijunjung”** tepat pada waktunya, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikanakhlakulkarimah bagi seluruh muslim seluruh penjuru dunia. Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Progra Studi Diploma III Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sudah banya mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dalam bentuk apapun dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan senang hati mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancarn disetiap kesulitan yang penulis hadapi.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda H.Kasman,BA , Ibunda Hj.Zuhelma serta keluarga besar yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moral maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini
3. Bapak Dr. Idris M.si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi universitas Negeri Padang.
4. Bapak Halkadri Fitra SE,MM,Ak,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibuk Dr.Eka Fauzihardani.S.E,Ak.M.Si selaku Dosen Pembimbing tugas akhir.
6. Ibuk Ade Elsa Betavia,S.E,M.Si selaku Dosen Pembimbing

Akademik dan Bapak/Ibuk dosen serta Staf pengajar dan Karyawan program studi DIII FE UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama diperkuliahan.

7. Tim sukses yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir shada, suci, putri, dey dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu sukses untuk kita semua. Aamiin YaAllah.

8. Semua teman-teman seperjuangan khusus Diploma III Akuntansi 2019 yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan seluruh kemampuan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari semua pihak penulis ucapkanterimakasih.

Padang, Oktoeber
2022

Fadilla Rahmi Illahi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian ini	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Otonomi Daerah	9
B. Kinerja Keuangan Daerah	10
C. Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah	18
D. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Waktu Penelitian	30
BAB IV	36
PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Instansi	36
B. Tugas Dan Fungsi	38
C. Struktur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung	39
D. Temuan dan Pembahasan	41
BAB V	48
PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 2 Badan Struktur Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung.....	39
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sijunjung	5
Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Resiko Ketergantungan Keuangan Daerah.....	15
Tabel 2. 2 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	16
Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Resiko Ketergantungan Keuangan Daerah.....	34
Tabel 3. 2 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	34
Tabel 4. 1 Perhitungan ketergantungan pemerintah kabupaten Sijunjung	41
Tabel 4. 2 Perhitungan Kemandirian Pemerintah Kabupaten Sijunjung	44
Tabel 4. 3 Komponen Realisasi Pendapatan asli daerah Kabupaten Sijunjung.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang direncanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernisasi pembangunan bangsa dan kemajuan sosial ekonomi,yang pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar tujuan tersebut dapat tercapai. Maka pelaksanaan pemangunan tersebut harus dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efesien,oleh karena itu ditetapkan otonomi daerah maka setiap melaksanakan wewenang yang luas dalam merencanakan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk penyelenggaraan pembangunan suatu daerah ynag sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang dalam pengelolaan keuangan masih timbul masalah,hal ini hal ini menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan public serta juga merupakan tuntutan reformas. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dulunya sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah provinsi, kota, kabupaten diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau Negara. Pembangunan daerah sebagai integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawaban menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Otonomi daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan adanya hak otonomi tersebut pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diantaranya Rasio Kemandirian keuangan daerah dan Rasio ketergantungan keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman. Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim,2007). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah pada pihak eksternal semakin rendah dan begitu pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin tinggi partisipasi dari masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah.

Ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah/provinsi terhadap pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang di terima oleh penerimaan daerah dengan total jumlah pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dimaksud dengan "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Keberhasilan dari suatu daerah terlihat dari penerimaan pendapatan asli daerah meningkat tiap tahunnya dan pertumbuhan ekonomi pada setiap sektor yang membaik sehingga kemandirian dari suatu daerah dapat dilihat dari berapa besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat . Pendapatan Asli Daerah tidak hanya berasal dari sumber pendapatan dan bantuan atau apapun pinjaman tetapi juga dari potensi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, yang terdiri dari; pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan pendapatan dari pengembalian

Kemandirian dan ketergantungan keuangan tidak hanya dapat dilihat dari besar atau kecilnya pendapatan asli daerah tapi dilihat juga dari pendapatan transfer eksternal yang di terima dari pemerintah pusat. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, bagi hasil pajak, dan bagi hasil bukan pajak. Disamping itu, ada juga dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Berikut adalah tabel yang menggambarkan total pendapatan pemerintah kabupaten Sijunjung selama tahun anggaran 2017 – 2021 :

Tabel 1. 1
Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sijunjung
Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2017	Rp.975.949.625.496,00	Rp.107.915.719.073,07	Rp.846.848.906.496,00	Rp.21.185.000.000,00
2018	Rp.941.608.636.209,38	Rp.79.055.940.215,38	Rp.822.893.857.194,00	Rp.39.658.838.800,00
2019	Rp.997.601.916.695,50	Rp.83.906.454.917,50	Rp.875.490.791.048,00	Rp.38.204.670.730,00
2020	Rp.941.763.316.836,88	Rp.92.474.357.995,88	Rp.809.126.417.541,00	Rp.40.162.541.300,00
2021	Rp.970.506.206.638,42	Rp.91.773.374.352,42	Rp.838.314.048.880,00	Rp.40.418.783.406,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung 2022

Berdasarkan tabel diatas pendapatan pemerintah kabupaten Sijunjung, total pendapatan daerah adalah hasil dari pendapatan asli daerah ditambah pendapatan transfer, dan ditambah lain-lain pendapatan yang sah. Dalam 5 tahun dari tahun 2017-2021, mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Namun perubahan tersebut belum menggambarkan bagaimana Rasio kemandirian dan Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Sijunjung dari tahun 2017-2021, melalui rasio kemandirian dan rasio ketergantungan bisa dilihat bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Sijunjung berdasarkan rasio tersebut serta mengetahui apakah rasio kemandirian dan rasio ketrgantungan mengalami kenaikan atau penurunan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis kemandirian dan ketergantungan pada pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2021.

Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian dan desentralisasi sangat penting sekali dilakukan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya.

Setiap pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi mempunyai laporan keuangan untuk dapat melihat atau mengetahui kondisi keuangan suatu pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan. Dari laporan keuangan yang disajikan akan menggambarkan kinerjanya. Namun untuk menggambarkan kinerja tidak dapat dilihat dari nilainya saja tetapi dilihat dari persentase perbandingan, yaitu perbandingan pendapatan transfer dengan pendapatan daerah atau disebut dengan rasio ketergantungan atau rasio kemandirian yang dilihat dari pendapatan asli daerah dengan transfer ditambah pinjaman. Dengan melakukan perbandingan persentase tersebut dapat dilihat kinerja pemerintah daerah/provinsi. Apakah pemerintah daerah Sijunjung memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dan tingkat kemandirian yang rendah, apakah pemerintah telah berhasil memaksimalkan sumber pendapatan asli daerah yang ada, serta apakah pemerintah daerah Sijunjung mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, penulis merasa perlu dilakukannya analisis rasio ketergantungan dan rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah Sijunjung dari tahun 2017-2021

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin mengetahui kinerja keuangan daerah Sijunjung lebih komprehensif berdasarkan kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah Sijunjung. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Rasio Ketergantungan dan Rasio**

Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Rasio Ketergantungan keuangan daerahnya pada tahun 2017-2021 ?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Rasio Kemandirian keuangan daerahnya pada tahun 2017 – 2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Rasio Ketergantungan dan kemandirian keuangan daerahnya pada tahun 2017-2021 ?

D. Manfaat penelitian ini

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pemerintah daerah dan pihak lain yang membaca hasil penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Untuk menemukan bukti empiris tentang kemandirian keuangan pemerintah daerah yang diteliti, serta untuk Merealisasikan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis Ketergantungan dan Kemandirian keuangan pemerintah daerah, Agar nantinya pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi Akademis

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuankhususnya di Universitas Negeri Padang.

4. Bagi pihak lain

Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.